

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA KETONG KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA

Andriyana

Andriyana9811@yahoo.co.id

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims at finding out the planning of people participation development in Ketong village, Balaesang Tanjung District, Donggala Regency. The researcher quotes Stoners' idea (1992: 202) that planning steps cover: 1) setting goals; 2) determining the present situation; 3) identifying opportunities and threats of the goals. This is a qualitative research. This research result shows that from the aspect of goals setting, the goals of Musrenbang have been implemented according to the guidance of Musrenbang implementation. From the second aspect, organizations of Ketong village have less involvement. The third aspect shows that Musrenbang in the level of village has been implemented as it should be, but there were two constraints in the process, they were the lack of cooperation of stakeholders and the lack of funds in holding Musrenbang. Finally, it is concluded that the planning of people participation development in Ketong village is categorized as non optimal, so that there must be improvement in the planning process.

Keywords: *Planning, Participation, Musrenbang.*

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi media Pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, disamping merangkul keikutsertaan masyarakat itu sendiri, partisipasi yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri

.Namun terkadang, Musrenbangdes nyatanya seringkali hanya menjadi "ritual" tahunan, atau sekadar penggugur kewajiban. Keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun. Akibatnya, perencanaan program tidak mendapat asupan gagasan variatif. Seakan – akan program berjalan sukses, terkadang program malah dirongrong sendiri masyarakat.

Ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola Musrenbangdes, seperti desa tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekadar memenuhi list program yang

diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi.

Data menunjukkan, dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, program yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya sepersekian persen. Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrenbang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan. Kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunann lainnya semakin menurun.

Tidak terjaringnya program – program yang diajukan juga terjadi karena beberapa faktor, seperti kesalahan postur anggaran dan prioritas pembangunan daerah tidak sesuai dengan program, dan beberapa faktor lainnya. Merangkum semua masalah tersebut dalam sebuah kerangka program yang holistik dan multisektor, didesainlah sebuah program perencanaan dan penganggaran yang lebih partisipatif, adil dan merata. Desain program ini mengusahakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dalam Musrenbangdes terserap dan terakomodasi. Model program ini

memberi kepastian dan jaminan program dan penganggaran yang diajukan dapat terealisasi nantinya.

Proses pelaksanaan Musrenbangdes merupakan proses partisipatif dimana berbagai keputusan diambil dalam suasana dialogis, akan tetapi Musrenbangdes seringkali tidak menghasilkan keputusan apa – apa sehingga masyarakat kecewa dan enggan mengikuti proses Musrenbangdes lagi. Proses pengambilan keputusan di dalam Musrenbangdes seringkali dilakukan secara cepat. Karena waktu yang amat singkat dan terlalu banyak sesi seremonial sehingga proses musyawarah yang dilakukan terlalu singkat.

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa menjadi kunci dari seluruh pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes yang kita harapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan mengusulkan kegiatan pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan.

Menurut Eugen C. Erickson (dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:58-59), bahwa partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Jadi, partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar. Dari pengertian/definisi tentang partisipasi masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa inti dari partisipasi masyarakat adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan, dan bukannya sebuah proses mobilisasi rakyat.

Selanjutnya, bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*).
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Dari ketiga tahapan dalam bentuk partisipasi masyarakat di atas, yang di mana sesuai dengan judul dalam penelitian ini penulis hanya sebatas mengkaji pada aspek perencanaan. Dari tahapan perencanaan tersebut, maka diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penyelenggaraan musrenbang Desa Ketong, yang kemudian akan menyesuaikan usulan program sesuai dengan kebutuhan di Desa Ketong, dan juga akan melihat pada sisi pendukung maupun penghambat dalam tujuan perencanaan musrenbang Desa Ketong. Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk mengutip teori dari (Stoners,1992:202), bahwa dalam perencanaan terdapat langkah – langkah dalam mencapai perencanaan tersebut yang meliputi:

1. Tetapkan tujuan/perangkat tujuan
2. Tentukan situasi sekarang
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan

Dengan demikian, dari ketiga langkah tersebut di atas maka diharapkan dalam menganalisa perencanaan pembangunan di Desa Ketong yaitu penyelenggaraan Musrenbang Desa yang terarah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga dalam proses perencanaan pembangunan ketiga langkah tersebut akan Penulis jadikan acuan di dalam penelitian ini dan dapat diterapkan saat penelitian di lapangan nanti.

Identifikasi potensi dan masalah desa/dusun serta analisis kesesuaian usulan dengan potensi wilayah desa/dusun berasal dari masing – masing dusun atau lingkungan yang ada di wilayah tiap tiap desa. Peran kepala dusun atau kepala lingkungan menjadi begitu vital karena melalui mereka, pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes dusun dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Akan tetapi seringkali, sebahagian besar diantara mereka menjadi tidak peduli akibat berbagai keterbatasan, hambatan serta tantangan paradigma Musrenbangdes yang seringkali menjemukan. Hal tersebutlah yang terjadi di Desa Ketong, Kabupaten Donggala.

Kontrol yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes di tingkat Desa, saat ini menjadi hal yang begitu mendesak karena upaya perbaikan harus dimulai dari memperbaiki pondasi yang selama ini begitu rapuh dan rentan akan proses yang sangat tradisional dan tidak terarah, sehingga pada saat pelaksanaan Musrenbangdes di Desa akan terlihat usulan – usulan yang seadanya dengan pertimbangan – pertimbangan yang sangat dangkal.

Meskipun selama ini pelaksanaan Musrenbangdes diwarnai dengan suasana dialogis yang sangat kental akan tetapi kondisi tersebut belum bersahabat untuk mengakomodir bahkan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin maupun kaum perempuan untuk menyampaikan uneg uneg, pendapat, saran atau keinginan mereka untuk memperbaiki keterperukan ekonomi yang mereka alami, Musrenbangdes masih menjadi domain bagi para elit Desa untuk menyampaikan proyek – proyek yang sarat dengan kepentingan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mensyaratkan ada kriteria normatif untuk menentukan program prioritas. Pada Pasal 17 ayat (5) disebutkan: *Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan*”.

Kriteria normatif ini memberikan dasar bahwa dalam hal penentuan program dan kegiatan prioritas perlu dipastikan bahwa program dan kegiatan tersebut berorientasi kepada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat terutama kelompok – kelompok

miskin dan marginal seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sedangkan dalam hal pencapaian keadilan maka perlu memperhatikan aspek – aspek keadilan untuk mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki – laki, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Kesinambungan program pembangunan dari tahun ke tahun serta keselarasan proses musrenbangdes dengan penganggaran yang dikelola sebagaimana diamanatkan dalam dasar hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini terjadi, sehingga harus ditetapkan Program Prioritas yang berorientasi pada Pemenuhan Hak – hak dasar masyarakat, serta mampu memastikan tercapainya keadilan.

Prinsip kesetaraan, musyawarah, anti dominasi dan diskriminasi, keberpihakan dan pembangunan holistik diharapkan dapat menjadi rujukan agar Rencana Pembangunan tidak tersekat – sekat pada wilayah Desa/Kecamatan, akan tetapi melihat permasalahan pembangunan secara utuh dan menyeluruh. Diharapkan bahwa dengan pelaksanaan Musrenbangdes selanjutnya akan tercipta Pemberdayaan Masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi khususnya dalam mengemukakan usulan dan berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes secara hakiki dapat tercapai.

Musrenbang merupakan wadah yang disiapkan oleh pemerintah dalam menjaring dan menyaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat agar ikut serta secara aktif dalam partisipasi untuk merencanakan pembangunan dilingkungan mereka sendiri mengingat perbedaan struktur sosial yang ada di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala menyebabkan kebutuhan pembangunan tidaklah sama. Ketong merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, sebahagian besar

penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani. Di Desa Ketong, perencanaan pembangunan partisipatif telah dimulai dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pada Musrenbang Desa Ketong, memang tahapan – tahapan pelaksanaannya sudah sesuai, akan tetapi jaminan keberlanjutan program/ kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat masih kurang sesuai apalagi pengawasan terhadap hasil dari pelaksanaan Musrenbang tersebut kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah Bagaimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah kualitatif. Menurut John W. Creswell (1988) dalam Hamid Patilima (2007:2) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang dibentuk kata – kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Maka, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat induktif yaitu peneliti membangun abstrak, konsep, proposisi dan teori.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut yaitu

sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan dengan mudah adanya data dan informasi akan lebih memudahkan Peneliti dalam melakukan studi administrasi yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, mulai Februari s/d April tahun 2015. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dengan jumlah informannya sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun kriteria informan terdiri dari: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Masyarakat.

Definisi konsep akan memudahkan peneliti menyederhanakan atau membatasi konsep – konsep yang akan diteliti, yaitu Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Tetapkan tujuan/perangkat tujuan: Dimana hal yang tercakup didalamnya harus merupakan kesepakatan bersama sejak awal. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur. Mencari dan mengevaluasi alternatif untuk mencapai sasaran.
2. Tentukan situasi sekarang: Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan. Diperlukan kegiatan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan: Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun diperkirakan akan muncul pada masa akan datang. Memilih usulan alternatif terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung.

Adapun jenis data pada penelitian ini, terdiri dari data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden atau data yang diperoleh ketika berada di lapangan/tempat penelitian. Sedangkan data

sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber – sumber lain, yang mendukung dari data primer.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah yaitu, Informan, Dokumen serta tempat dan peristiwa. Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Keseluruhan tahap penganalisisan data penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:16-20). Langkah-langkah analisis tersebut terdiri atas tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu: (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ketong adalah salah satu desa di Kecamatan Balesang Tanjung yang mempunyai luas wilayah 2.764,50 Ha. Jumlah penduduk Desa Ketong sebanyak 2085 jiwa yang terdiri dari 1033 laki-laki dan 1052 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 468 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 82 KK dengan persentase 17,53% dari jumlah keluarga yang ada di Desa Ketong. Secara administratif, Desa Ketong berbatasan dengan :
 Sebelah Utara : Desa Manimbaya
 Sebelah Timur : Desa Rano
 Sebelah Barat : Selat Makassar
 Sebelah Selatan : Desa Kamonji

Desa ketong terdiri dari 6 (enam) Dusun, yaitu 1) Dusun Ketong, 2) Dusun Dariami, 3) Dusun Palado, 4) Dusun Transmigrasi, 5) Dusun Kampung Baru, 6) Dusun Njulit. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 17 km dengan waktu tempuh + 45 menit dan dari ibukota kabupaten 162 km dengan waktu tempuh 5 jam. Jumlah penduduk Desa ketong menurut

Sensus Statistik September 2014 sebanyak 2085 orang atau sebanyak 468 KK.

Dalam pengamatan dan temuan Penulis saat di lapangan, dengan berdasarkan pada hasil (Musrenbangdes) tahun 2014 perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Ketong, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala bahwa hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama pihak Pemerintah Desa Ketong dan juga para masyarakat Desa Ketong yang ikut hadir dalam musyawarah tersebut, disepakati beberapa poin penting dalam pengusulan program pembangunan di Desa Ketong, yaitu

Tabel 1. Usulan Program/Kegiatan Musrenbang Desa Ketong 2014

No.	Uraian Usulan Kegiatan	Keterangan
1.	Pembangunan Drainase	Belum Terealisasi
2.	Perbaikan Jalan	Belum Terealisasi
3.	Pembangunan Tower Telekomunikasi	Belum Terealisasi
4.	Penambahan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik	Belum Terealisasi
5.	Pembangunan Sarana Air Bersih	Belum Terealisasi

(Sumber: Data Sekunder, Hasil Musrenbangdes Ketong 2014)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Musrenbang Desa, pada musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah – langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Ketong yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Desa antara lain: Pembangunan Drainase; Perbaikan Jalan, Pembangunan Tower Telekomunikasi, Penambahan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik, dan Pembangunan Sarana Air Bersih, tidak dapat terealisasikan sebagaimana dengan apa yang menjadi kebutuhan umum warga masyarakat Desa Ketong. Hal tersebut disebabkan, peruntukkan dana pada Desa Ketong untuk kelima usulan program tersebut, tidak sesuai/ melebihi dari dana yang diberikan pada Desa Ketong.

Maka yang hanya dapat dijalankan program/ kegiatan sebagaimana pengganti pada program/ kegiatan tersebut, hanya diperuntukkan pada pembiayaan perbaikan sarana gedung kantor desa dan beberapa renovasi gedung Sekolah Dasar, yang kondisi bangunannya pun juga sudah kurang baik dan mengalami kerusakan pada atap, lantai maupun tembok. Dan justru hal tersebut, usulan yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, saat pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Donggala. Sebagai contoh, kebutuhan masyarakat seperti tenaga kesehatan seperti Dokter, memang sangat dibutuhkan apalagi saat ini, Desa Ketong hanya mempunyai Puskesmas Pembantu sebagai satu – satunya sarana kesehatan yang ada di Desa tersebut. Kemudian seperti pembangunan sarana air bersih juga sangat dibutuhkan, mengingat sulitnya mendapatkan air bersih pada Desa Ketong, Selain itu juga, pada aspek komunikasi seperti jaringan seluler, pada Desa Ketong tidak adanya jaringan seluler *handphone* sebagai sarana telekomunikasi bagi masyarakat, sehingga mereka kesulitan untuk berkomunikasi.

Padahal dengan melihat tingkat kehadiran peserta dari pihak masyarakat Desa Ketong yang berpartisipasi selama proses musrenbang berlangsung menandakan kesadaran masyarakat Desa Ketong akan pentingnya mengikuti musrenbang sebagai sarana dalam memperjuangkan pembangunan di Desa Ketong. Namun, dalam merencanakan kegiatan pembangunan ini, tidak dapat terealisasikan kepada usulan kebutuhan mendesak masyarakat Desa Ketong.

Sehingga dengan kondisi seperti tersebut di atas, memunculkan persepsi masyarakat Desa Ketong saat ini akan pelaksanaan Musrenbang yang dimana usulan dari masyarakat tidak dapat diperjuangkan serta justru berkurangnya keikutsertaan mereka pada saat berlangsungnya musyawarah perencanaan pembangunan

partisipatif di Desa Ketong yang makin menurun dari tahun – tahun sebelumnya.

Kemudian dari pihak pemerintah Desa Ketong, beralasan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan faktor Dana peruntukkan untuk Desa Ketong, sangat minim dan justru tidak mencukupi pembangunan dari usulan – usulan tersebut. Namun, pihak pemerintah Desa Ketong akan melakukan pembicaraan kembali terkait dengan usulan–usulan sebelumnya, untuk dicarikan jalan keluar agar program/ kegiatan tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan dari masyarakat Desa Ketong.

a. Tetapkan Tujuan/ Perangkat Tujuan

Dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Ketong Kab. Donggala, Penulis menyimpulkan ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, Pertama: perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa identifikasi kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun beragam, ada yang melakukannya dengan cara informal ada juga yang bahkan tidak menyelenggarakan penyelidikan kebutuhan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kepala dusun tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga tidak perlu adanya forum penyelidikan kebutuhan secara formal yang melibatkan seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam aspek tetapkan tujuan/ perangkat tujuan perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi

masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Artinya bahwa dukungan masyarakat terhadap pembangunan di Desa Ketong tergolong kecil hal ini ditandai dengan banyaknya usulan program dari pihak masyarakat tidak terealisasi, dan minimnya pembangunan yang di danai dengan modal swadaya mengindikasikan bahwa masyarakat tidak begitu antusias dengan pembangunan di wilayahnya, ada kesan apatis dan menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah desa.

b. Tentukan situasi sekarang

Partisipasi warga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbang. Dimana dalam Musrenbang tersebut memiliki dasar yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki tujuan sosial, dan ada keterlibatan warga sebagai stakeholders dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Kegiatan itu mempunyai kerangka perencanaan bersama untuk menetapkan tujuan, kegiatan, pelaksanaan, dan penerima manfaat, serta metode pemantauan dan evaluasi program. Aktivitas itu pun selalu mengedepankan atau berasal dari aspirasi warga. Dengan demikian, ada ruang yang dibuka untuk berpartisipasi. Warga harus didorong untuk menciptakan aktivitas. Karena itu rakyat harus terorganisir.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Ketong belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan dalam proses perencanaan pembangunan belum memberikan peluang yang sama kepada masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran serta masih terkendala waktu. Dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Ketong, baik di tingkat Dusun maupun Desa, masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang yang lebih tinggi.

c. Identifikasi pendukung/ Penghambat tujuan

Keterlibatan unsur – unsur dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses penganggaran sebenarnya adalah merupakan sesuatu kewajiban dan merupakan salah satu bagian dari hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Dari hal ini terlihat bahwa sistem bottom-up planning ini adalah sebagai suatu pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih berdasarkan suatu kebutuhan nyata dari masyarakat.

Program – program pembangunan yang diusulkan oleh desa menjadi serba tidak pasti. Ketidakpastian ini menyebabkan musrenbang bagi proses pembangunan di daerah dianggap antara ada dan tiada. Oleh karena itu, tidak heran bila dalam kasus-kasus tertentu program yang tidak pernah diusulkan pada musrenbang, tiba-tiba harus dikerjakan oleh pihak desa karena program tersebut diusung langsung oleh satuan kerja dari kabupaten.

Pada aspek identifikasi pendukung/ penghambat tujuan sudah cukup baik, yang ditandai dengan keterlibatan berbagai pihak yang telah berusaha melakukan segala hal untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Ketong. Segala macam usulan dalam meningkatkan kemajuan Desa Ketong, sudah disertai dalam usulan program pelaksanaan Musrenbang Desa yang diperjuangkan sampai pada tingkat Kabupaten. Walaupun dalam pengusulan tersebut, tidak dapat terealisasi sebagaimana dengan usulan yang telah ada.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pembangunan Partisipatif, dalam konteks multi stakeholder, harus terdapat keterlibatan pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang merupakan akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta organisasi profesi yang ada, serta keterlibatan perguruan tinggi dan media massa. Dari ketiga aspek dalam perencanaan yang terdiri: pertama aspek tetapkan tujuan/perangkat tujuan masih kurang baik, karena perencanaan pembangunan belum memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga banyaknya usulan yang tidak sesuai dengan usulan pada Musrenbangdes. Kemudian kedua yaitu pada aspek, tentukan situasi sekarang masih kurang baik, di mana kurangnya keterlibatan unsur masyarakat yaitu unsur ormas Desa Ketong, dan pada aspek yang ketiga, yaitu identifikasi pendukung/ penghambat tujuan sudah cukup baik, karena penyelenggaraan Musrenbang Desa Ketong telah dilaksanakan sebagaimana mestinya hanya saja dalam proses pelaksanaannya menemui kendala pada kurangnya kerjasama yang ada dalam stakeholder di Desa Ketong dan juga kurangnya biaya dalam mendanai kebutuhan pembangunan Desa sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat Desa Ketong dapat dikategorikan masing kurang baik.

Rekomendasi

Dari uraian kesimpulan tersebut di atas, maka dapat penulis menguraikan beberapa saran dalam mendukung penelitian ini yaitu:

1. Dalam Musrenbang tingkat Desa perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat ke depan seharusnya semua *stakeholder* pembangunan Desa Ketong Kecamatan Balesang Tanjung Kabupaten Donggala, dilibatkan dalam proses Musrenbang dalam komposisi yang lebih

utuh dan juga terlibat dari proses awal. Tidak hanya terlibat pada saat musrenbang saja. Artinya, Pemerintah Desa Ketong harus memikirkan model alternatif selain musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.

2. Perlunya *Civic education* kepada masyarakat Desa Ketong, agar masyarakat mengetahui hak-haknya dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat Desa Ketong untuk dapat mengikuti proses perencanaan pembangunan di Desa Ketong. Sehingga dalam penyelenggaraan Musrenbang Kedepannya dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, khususnya kepada tim penyunting Bapak Dr. Syaharuddin Hattab, M.Si dan Ibu Dr. Haslinda Baji, M.Si. Akhir kata, Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT dengan Rahmat dan hidayah-Nya, kiranya apa yang telah di berikan ini dapat membawa manfaat dan semoga di balas dengan pahala yang lebih baik AMIN.

DAFTAR RUJUKAN

- Miles, B. Matthew & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Stoner, James A.F. 1992. *Manajemen, Jilid 1*. Erlangga: Jakarta.